

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 pasal 1 ayat 1, diterangkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi agar setiap warga negara dapat hidup, berkembang, dan memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya secara maksimal. Kesejahteraan sosial juga merupakan kegiatan yang dibentuk untuk memungkinkan individu maupun kelompok agar mampu mengatasi permasalahan sosial yang terus berubah. Sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Akan tetapi, pada kenyataannya, permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terutama karena pandemi COVID-19 yang mengancam aktivitas sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar yang mengakibatkan adanya peningkatan jumlah pengangguran hingga berujung menjadi kemiskinan (Ratna.A.P dkk, 2022). Sementara itu, kesejahteraan sosial dapat dicapai minimal jika kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan relasi sosial serta lingkungan yang mendukung telah terpenuhi sehingga potensi serta taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk mencegah permasalahan sosial yang berdampak negatif pada kehidupan seperti kemiskinan, kekerasan, serta penyimpangan sosial (Fahrudin, 2012).

Seseorang atau keluarga yang mengalami suatu hambatan, kesulitan atau gangguan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi sosial serta menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai

dan wajar biasa disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS di Indonesia memiliki kriteria yang berbeda-beda, baik dari segi umur, fisik, mental maupun hambatan lainnya. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, terdapat beberapa golongan PPKS yang ada di Indonesia saat ini, diantaranya yaitu anak-anak terlantar, wanita rawan sosial-ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukanlah adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berbagai usaha ini dapat diwujudkan salah satunya dengan pembuatan sebuah panti sosial. Menurut KBBI, panti diartikan sebagai rumah atau kediaman. Salah satu jenis panti yang dapat ditemukan di Indonesia adalah panti sosial. Panti sosial ditujukan untuk memberi pelayanan dan rehabilitasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut fungsinya, panti sosial terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu Panti Sosial Bina Netra, Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Tresna Wredha, Panti Derma dan lain sebagainya. Nama-nama panti sosial tersebut diberikan sesuai dengan bentuk pelayanan yang ada di dalamnya, seperti Panti Sosial Bina Netra yang berperan untuk memberikan pelayanan bagi para penyandang cacat netra (mata). Panti Sosial Asuhan Anak yang berperan untuk memberikan perawatan bagi anak yatim piatu khususnya yang terlantar dan kurang mampu. Panti Tresna Wredha yang berperan untuk memberikan pelayanan pada seorang lansia (lanjut usia). Ada pun Panti Derma yang berdasarkan KBBI memiliki arti yaitu rumah tempat memelihara dan merawat orang jompo, anak yatim atau piatu, orang terlantar, dan sebagainya.

Jawa timur sebagai provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat, serta diketahui berperan sebagai pusat industri dan keuangan kawasan tengah dan timur Indonesia tidak menjadikannya bebas dari permasalahan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Timur menduduki urutan kedua tertinggi di Indonesia. Diantaranya

Kota maupun Kabupaten yang memiliki jumlah PPKS tertinggi di Jawa Timur yaitu Ngawi, Gresik, Surabaya, Malang dan Mojokerto.

Tabel 1. 1 Jumlah PPKS di Jawa Timur tahun 2017-2019

| Masalah Kesejahteraan Sosial | Kabupaten/Kota | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|----------|--------|-----------|
| | Ngawi | Gresik | Surabaya | Malang | Mojokerto |
| Wanita Rawan Sosial – Ekonomi | 3765 | 4849 | 236 | 12263 | 7888 |
| Korban Tindak Kekerasan | 0 | 148 | 0 | 0 | 16 |
| Lanjut Usia Terlantar | 45921 | 16422 | 15354 | 4541 | 7761 |
| Gelandangan | 4 | 1911 | 53 | 139 | 62 |
| Total | 49690 | 21472 | 17501 | 16943 | 15727 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2019

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang tertera pada tabel 1.1 mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2017-2019 diketahui bahwasannya PPKS di kabupaten Gresik memiliki jumlah yang cukup merata di setiap golongannya meskipun bukan termasuk daerah dengan jumlah keseluruhan PPKS tertinggi. Menurut RENCANA KERJA (RENJA) Kabupaten Gresik tahun 2021, ada beberapa isu penting yang dihadapi dalam pembangunan terkait permasalahan kesejahteraan sosial diantaranya yaitu adanya peningkatan PPKS dikarenakan kompleksnya permasalahan sosial, belum optimalnya penanganan dan pelayanan kepada para PPKS dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial. Saat ini, jenis panti sosial yang dapat ditemukan di Gresik kebanyakan merupakan panti sosial asuhan anak, padahal jika dilihat dari segi usia PPKS yang tersebar juga tidak sedikit merupakan orang-orang yang telah dewasa. Ditambah dengan kualitas fasilitas sosial yang belum memadai membuat persoalan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan lebih lanjut baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakatnya sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan panti sosial khususnya bagi masyarakat berusia dewasa juga diperlukan pada Kabupaten Gresik. Menurut fungsinya, jenis panti yang dapat digunakan untuk membantu

menanggapi permasalahan tersebut adalah panti derma. Dimana dari arti katanya, panti ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk menjaga, mengurus, hingga membiayai para penghuninya terutama yang telah berusia dewasa. Ditambah dengan penerapan arsitektur perilaku yang mengutamakan pada proses mengamati dan mengenali pola perilaku manusia terhadap lingkungan disekitarnya. Dengan demikian, pengusungan objek rancang berupa panti derma dengan pendekatan arsitektur perilaku nantinya diharapkan mampu membantu memecahkan permasalahan panti sosial berdasarkan isu-isu yang telah terjadi khususnya di Kabupaten Gresik.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Gambaran hasil yang ingin dicapai dari alasan diperlukannya panti derma di Kabupaten Gresik berdasarkan aspek non arsitektural (tujuan), diantaranya yaitu:

1. Memberikan pelayanan berupa bimbingan dan rehabilitasi baik secara fisik maupun psikologis pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
2. Memberikan perlindungan secara fisik, sosial, dan psikis pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Sedangkan gambaran hasil yang ingin dicapai berdasarkan aspek arsitektural (sasaran), diantaranya yaitu:

1. Menyediakan wadah yang mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
2. Menyediakan fasilitas untuk menyalurkan bimbingan fisik, mental, sosial, serta pelatihan sosial agar mampu mandiri dan berperan aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakat
3. Menciptakan lingkungan yang mendukung wadah serta fasilitas bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

1.3 Batasan dan Asumsi

Strategi dalam proses menyederhanakan penyelesaian rancangan berdasarkan aspek arsitektural dan non arsitektural, diantaranya sebagai berikut.

Batasan:

1. Pelayanan panti derma ini ditujukan utamanya kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti lansia terlantar, korban tindak kekerasan, serta wanita rawan sosial – ekonomi, dan bukan termasuk ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)
2. Penerima pelayanan dimulai dewasa usia 18 tahun hingga lansia usia ≥ 60 tahun
3. Jam operasional panti dimulai pada pukul 08.00 hingga pukul 16.00, serta dapat disesuaikan kembali (fleksibel) jika terjadi keadaan darurat.

Asumsi:

1. Waktu kunjungan panti mengikuti jam operasional panti yaitu pada pukul 08.00 hingga pukul 16.00, namun tidak diberlakukan jam operasional fleksibel.
2. Panti derma ini didirikan dengan status kepemilikannya adalah milik Pemerintah.
3. Asumsi daya tampung pada panti ini diperkirakan mencapai 250 penyandang masalah kesejahteraan sosial.

1.4 Tahapan Perancangan

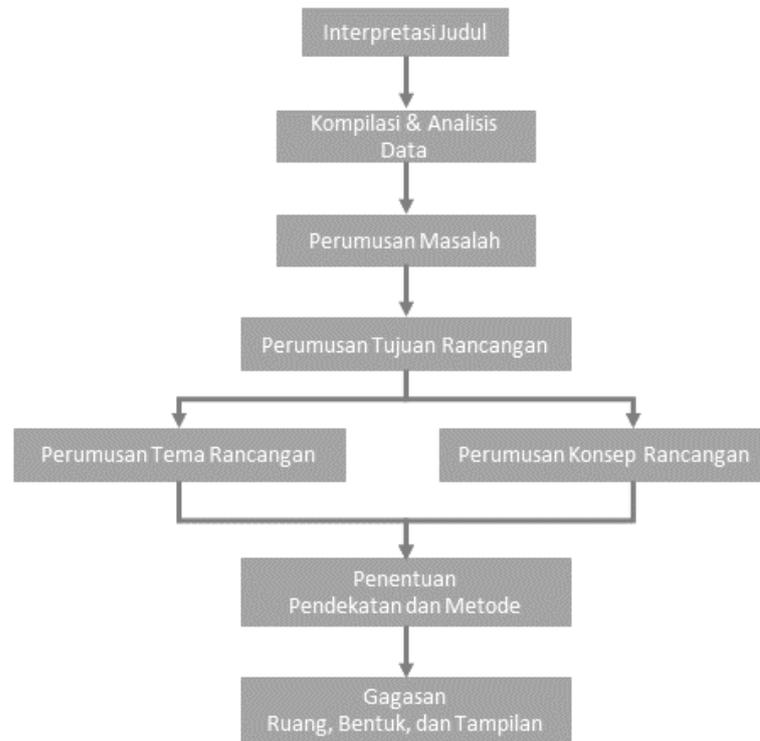
Pada tahapan perancangan, dijelaskan secara skematik tentang proses dan Langkah-langkah yang dilakukan perancang dalam menghasilkan karya rancangannya.

1. Diawali dari pemahaman judul perancangan Panti Derma di Kabupaten Gresik
2. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan obyek rancangan yang didapat mulai dari Peraturan Menteri mengenai panti sosial, hingga berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur terhadap jumlah penyandang kesejahteraan sosial.
3. Data dan informasi yang didapat kemudian di analisis lebih lanjut untuk mendapatkan acuan langkah-langkah dalam merancang obyek.
4. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan akan menghasilkan rumusan dan metoda rancang yang membantu dalam menemukan tema rancangan panti derma.

5. Teori dan metode yang telah ditemukan sebelumnya akan membantu terbentuknya sebuah konsep untuk penyusunan bangunan panti

1.5 Sistematika Pembahasan

- a. Bab I Pendahuluan: Berisi tentang tahapan-tahapan mulai dari latar belakang pemilihan judul, tujuan perancangan, batasan dan asumsi perancangan, serta tahapan perancangan dilengkapi dengan uraian penjelasan isi di tiap tahapannya.
- b. Bab II Tinjauan Obyek Perancangan: Berisi tentang tinjauan terhadap obyek perancangan yang mirip dengan judul rancangan, meliputi tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum membahas tentang pengertian judul rancangan, studi literatur membahas tentang panti derma, persyaratan ruang pada panti, serta lingkungan yang mendukung panti. Sedangkan tinjauan khusus membahas tentang penekanan perancangan, lingkup pelayanan, hingga perhitungan luas dan ruang yang akan diterapkan pada rancangan.
- c. Bab III Tinjauan Lokasi: Berisi tentang kajian mengenai latar belakang dipilihnya lokasi, penetapan lokasi, serta kondisi lapangan lokasi seperti aksesibilitas, potensi bangunan sekitar, hingga persyaratan-persyaratan yang akan digunakan sebagai acuan pembangunan.
- d. Bab IV Analisis Perancangan: Berisi tentang analisis site, analisis kebutuhan dan fungsi ruang, serta analisis bentuk dan tampilan yang nantinya akan diterapkan pada perancangan Panti Derma dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku di Kabupaten Gresik.
- e. Bab V Konsep Perancangan: Berisi tentang dasar dan metode yang dipakai sebagai acuan perancangan, serta konsep-konsep yang dipakai sebagai dasar perancangan, mulai dari konsep tema, konsep tapak, bentuk, utilitas, serta struktur.



Gambar 1. 1 Bagan Tahap Perancangan
Sumber: Ilustrasi Penulis, 2022